



TARIK ULUR RUU PEMILU

RAMALAN NASIB POLITIK ANIES, RIDWAN KAMIL HINGGA KHOFIFAH



Tarik-ulur rencana revisi Undang-undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) makin pelik. Semula semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat merevisinya, sehingga masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Belakangan 'angin berbalik arah', para wakil rakyat justru ramai-ramai menolak sendiri rencana awal mereka. Bila UU Pemilu tak jadi direvisi, maka Pilkada 2022 dan 2023 ditarik serentak ke 2024. Ramalan nasib politik kepala daerah pun mencuat. Nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Edy Rahmayadi hingga Khofifah Indar Parawansa pun santer diprediksi kemungkinan tidak bisa melanjutkan kepemimpinan di periode kedua. Ditunggu saja tanggal mainnya!

Baca Hal 11

SIKAP PARPOL TERKAIT REVISI UU PEMILU

Mereka Yang Menolak Revisi (471 Kursi)

Mereka Yang Setuju Revisi (104 Kursi)

- | | |
|--|--|
|  PDIP (128 kursi) |  Partai NasDem (59 kursi) |
|  Partai Gerindra (78 kursi) |  PPP (19 kursi) |
|  Partai Golkar (85 kursi) |  PAN (44 kursi) |
|  PKB (58 kursi) | |

- | | |
|---|---|
|  PKS
(50 kursi) |  Partai Demokrat
(54 kursi) |
|---|---|

OPTIMISTIS! TIM FKM UI PREDIKSI CORONA RI SELESAI SEPTEMBER 2021

Jakarta- Pandemi virus corona belum hilang di dunia, termasuk Indonesia. Kasus masih terus naik tiap harinya. Per Selasa (9/2), kasus bertambah 8.700 orang. Sehingga total kasus mencapai 1.174.779 orang.

Pasien sembuh juga meningkat sebanyak 10.424 orang. Kasus sembuh akumulatif berjumlah 973.452 orang. Sementara kasus kematian juga masih terus melonjak. Kini bertambah 213 orang sehingga total 31.976 orang meninggal karena corona.

Terkait vaksinasi, jumlah total penerima vaksinasi COVID-19 tahap pertama hari ini mencapai 845.407 orang. Sementara, sebanyak 221.453 orang telah disuntik dua dosis vaksin virus corona. Melihat itu, Bloomberg memprediksi Corona di Indonesia baru selesai 10 tahun ke depan.

Namun, estimasi tim Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI terkait prediksi pandemi di Indonesia berdasarkan hitungan vaksinasi menunjukkan hasil sangat optimistis. Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono mengunggah hasil tim riset FKM UI soal perhitungan pandemi Corona di RI.

"Prediksi Indonesia tuntas vaksinasi sampai 10 tahun bisa saja terjadi kalau TIDAK lakukan strategi vaksinasi yg cerdas & inovatif untuk kendalikan Pandemi. Tim FKMUI buat simulasi strategi vaksinasi yg komprehensif. Kita bisa lebih cepat dg strategi pilihan yg tepat," jelasnya dalam akun media sosial pribadinya.

Disebutkan, pandemi bisa usai di September 2021 jika vaksinasi Covid-19 sesuai target. "Jumlah vaksinator: 31 ribu orang. Jumlah vaksinasi/vaksinator/hari: 30 orang (per hari 1 orang vaksinator menyuntik vaksin ke 30 orang). Perhitungan dimulai dari tanggal awal program vaksinasi pada masyarakat, yaitu 3 Maret 2021."

Sementara cakupan vaksinasi yang diperlukan disebut harus mencapai 70.980.000 orang, dengan jumlah vaksinasi per hari 930 ribu suntikan. Dengan begitu target vaksinasi disebut tim FKM UI tercapai dalam 167 hari.

"Hasil estimasi wabah mulai terkendali di September 2021. terjadi penurunan kasus baru secara konsisten," ungkap hasil riset tersebut. "Hasil dapat lebih cepat dengan tambahan vaksin Pfizer, AstraZeneca, dan Novavax yang mempunyai efikasi lebih tinggi. Jika jumlah dan kapasitas vaksinator ditambah, pelibatan swasta dan kapasitas cold chain," jelas riset tersebut.

Tren Sembuh Ikut Turun

Sementara itu, Jubir vaksinasi corona di Indonesia Prof Wiku Adisasmito membeberkan data mingguan. Baik kasus positif, sembuh, dan kematian corona menurun. "Untuk kasus positif terdapat penurunan kasus sebesar 10,8% di tingkat nasional dibanding minggu lalu. Ini merupakan capaian positif dan memperlihatkan penurunan penularan di masyarakat," kata Wiku dalam jumpa pers

virtual, Selasa (09/02).

Namun demikian, terdapat 5 provinsi yang harus kembali meninjau upaya Covid-19 di wilayahnya. Sebab, masih mencatat kenaikan kasus tertinggi yaitu DKI Jakarta, NTT, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur.

"Dari kelima provinsi tersebut, hanya DKI provinsi yang berasal dari Jawa yang masih masuk 5 besar penambahan kasus positif corona mingguan tertinggi," tuturnya.

Ini perkembangan yang baik karena jika diingat selama 4 minggu ke belakang, penambahan kasus positif didominasi dari Jawa dan Bali. Namun Wiku mengimbau seluruh pihak tidak boleh lengah dengan kabar baik ini.

"Saya tetap minta kepada seluruh provinsi terutama yang tadi saya sebutkan untuk mengevaluasi protokol kesehatan termasuk penegakan disiplinnya. Sehingga angka penularan di masyarakat dapat ditekan dan penurunan kasus positif jadi lebih banyak hingga tak ada sama sekali," ungkap dia.

Untuk kasus kematian menurun 32% dibanding minggu sebelumnya. Wiku mengatakan, berarti upaya treatment kepada pasien Covid-19 sudah sesuai standar sehingga dapat menekan angka kematian. "Saya minta ini dipertahankan agar mereka yang dirawat segera sembuh," tutur dia.

Namun terdapat 5 provinsi yang masih mencatat angka kematian tertinggi. Yaitu NTB, Maluku Utara, Jambi, Maluku dan Aceh. "Untuk perkembangan kematian bahkan provinsi yang berasal dari Pulau Jawa sudah seluruhnya keluar dari 5 besar kematian tertinggi, ini perkembangan yang baik," jelasnya.

"Selain itu kenaikan kematian juga mengalami penurunan signifikan, bahkan Aceh yang hanya naik 1 kematian masuk ke dalam 5 besar. Ini artinya 29 provinsi lainnya tidak mengalami kenaikan mingguan, ini perkembangan yang sangat baik," tegasnya.

Dibandingkan 2 indikator sebelumnya, indikator kesembuhan tidak menunjukkan kabar baik. Justru mengalami penurunan sebesar 4,2% dibanding minggu sebelumnya. Terdapat 5 provinsi yang mencatat kesembuhan tertinggi yaitu DKI, Jabar, Kaltim, Lampung dan Kepri. Wiku pun mengapresiasi.

"Saya juga minta kepada provinsi lain memastikan treatment sesuai standar kepada pasien agar mereka lekas sembuh dan berkontribusi meningkatkan kesembuhan secara nasional," tutup dia. (ist)

SIMULASI BERAKHIRNYA PANDEMI CORONA DARI FKM UI

FKM UI mensimulasikan awal penghitungan vaksinasi corona untuk masyarakat umum pada Maret 2021.

- Jumlah vaksinator 31 ribu orang, per hari 1 orang 30 vaksinasi
- Target disuntik: 39 persen dari populasi (di luar nakes dan petugas pelayanan publik) atau sekitar 70.980.000 orang. itu
- Dosis vaksin yang dibutuhkan: 141.850.000 dosis
- Efikasi vaksin Sinovac 65,3 persen

Dengan target itu, vaksinasi di Indonesia harus seperti di bawah ini:

- Per hari harus 930 ribu suntikan
- Vaksinasi selesai dalam 176 hari (melengkapi sebelumnya, sudah 70 persen divaksinasi)
- Tanggal selesai: 8 atau 15 atau 21 September 2021.
- Apabila vaksinasi dan target itu terpenuhi maka akan menurunkan Reproduction Rate (Rt) atau indeks penularan dari 1,2 (saat ini) menjadi 0,9 (wabah terkendali).

Namun hasil bisa terlihat lebih cepat dari simulasi dengan beberapa kondisi

di bawah ini:

- Tambahan vaksin Pfizer, AstraZeneca, dan Novavax yang efikasinya lebih tinggi dari vaksin Sinovac
- Jika jumlah dan kapasitas

- vaksinator ditambah
- Pelibatan swasta dalam kapasitas cold chain system



Sumber: Gdts: FKM UI, Freepik

**BELAJAR
ONLINE**



BLITAR - Kebijakan sekolah melalui kegiatan belajar mengajar dalam jaringan (daring) atau online di Kabupaten Blitar dinilai tak efektif mencegah Covid-19. Hal tersebut diungkapkan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Blitar dalam pandangan umumnya terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.

"Fraksi PKB DPRD Kabupaten Blitar menilai selama ini kebijakan kegiatan belajar mengajar daring tidak efektif, dalam mencegah penyebaran Covid-19," ujar juru bicara FPKB, Adib Zamhari dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (09/02).

Alasannya, dengan sekolah online malah banyak dijumpai pelajar yang menghabiskan waktunya di luar rumah, seperti di cafe dan warung kopi selama pandemi Covid-19. "Bahkan tidak hanya siang hari, tapi juga pada malam hari. Karena tidak sekolah, mereka menghabiskan waktunya dengan bermain dan nongkrong di cafe atau warung kopi di saat penyebaran Covid-19 yang masih mengkhawatirkan," jelasnya.

Fraksi PKB mengingatkan pelajar merupakan aset masa depan bangsa, sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki tugas untuk menjaganya. "Tugas ini

KEBIJAKAN SEKOLAH DARING PEMKAB BLITAR DINILAI TAK EFEKTIF CEGAH CORONA

tidak hanya diemban oleh keluarga, guru dan sekolah saja, tapi seluruh lapisan masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan dan penertiban pelajar di cafe dan warung kopi," tandas Adib.

Selain itu, tidak efektifnya belajar secara daring juga dinilai Fraksi PKB merepotkan orang tua. Sebab selama ini justru orang tua yang mengerjakan tugas sekolah, ketika diberikan tugas dari gurunya. "Kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, namun kita harus mencari solusinya," ungkapnya.

Terakhir Fraksi PKB juga minta Satgas Covid-19 Kabupaten Blitar lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi, maupun penindakan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terkait pandemi Covid-19 pungkasnya.

Sementara itu 4 fraksi lainnya di DPRD Kabupaten Blitar juga menyampaikan pandangannya, terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Blitar selama tahun 2020 yakni Fraksi PDI-P, GPN, Golkar Demokrat dan PAN.

Fraksi PDIP mengapresiasi kinerja Bupati dan Wakil Bupati Blitar selama memimpin Kabupaten Blitar 2016-2021. Selanjutnya berharap RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Blitar dapat dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode selanjutnya.

Sementara itu Fraksi Golkar Demokrat menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar dan SKPD selama 2020 cukup baik, dengan adanya pembangunan RSUD Srengat dan Satgas Covid-19 juga sudah berusaha untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Melalui penyediaan rumah sakit, labora-



Juru bicara FPKB DPRD Kab Blitar, Adib Zamhari

torium, Tes PCR dan rumah karantina, yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan.

Kemudian Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) dan Fraksi PAN juga mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Blitar, dalam menggelar Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada 2020 lalu ditengah pandemi Covid-19.

Selanjutnya disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito pembahasan LKPJ Bupati dan Wakil Bupati Blitar akan dilanjutkan oleh Panitia Khusus (Pansus) dengan penuh tanggungjawab. "Karena LKPJ sesuai aturan harus disampaikan maksimal 3 bulan setelah akhir tahun anggaran, bersamaan dengan akan berakhirnya masa jabatab Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada bulan ini maka pembahasan akan dilakukan dengan cepat dan cermat," pungkas Suwito dari PDIP ini. (ais)

gurukuhebat.id Selamat Hari
PERS NASIONAL 2021

HARI PERS NASIONAL 2021

"Bangkit dari Pandemi, Pers sebagai Akselerator Perubahan"

SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2021
"Bangkit dari Pandemi, Pers sebagai Akselerator Perubahan"

KABUPATEN LAMONGAN

HARI PERS NASIONAL 2021

H. Abdul Ghojur, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
Retno Wardhani S.Kem., M.Kom, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lamongan
Drs. Huzuf Aqib, M.M, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Lamongan
Drs. H.Darwoto, M.M, Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan
Drs. Iuris Wibawa, M.M, Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan

Foto: Adhni / LenteraToday



Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa

Surabaya - PPKM Mikro mulai digelar Selasa (09/02) hingga Senin (22/02). Di Provinsi Jawa Timur (Jatim), ada 2 kabupaten/kota yang masuk zona merah Covid-19. Sementara itu, di tingkat Rukun Tetangga (RT) ada sekitar 210 RT yang masuk zona risiko tinggi ini.

"Setiap Selasa update di masing-masing kabupaten/kota. Saat ini, insyaallah di Jombang dan Kota Mojokerto. Kemarin di Trenggalek dan Kabupaten Madiun," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, dikutip Selasa (09/02).

Khofifah menjelaskan, setelah diterapkan PPKM Mikro di Jatim, juga akan di-update zona merah hingga tingkat RT. Sejauh ini, di Jatim ada 210 RT yang masuk kategori zona merah Covid-19. "Begitu juga di tingkat RT/RW, akan di-update skala. Maka, adanya posko di desa atau kelurahan untuk me-manage data.

SEBANYAK 210 RT DI JATIM MASUK ZONA MERAH COVID-19

Kalau RT ada 210 yang masuk kategori zona merah," terangnya.

Lebih lanjut Khofifah membeberkan, ada 1.245 RT yang masuk zona oranye di Jatim. Kemudian 10.023 RT masuk zona kuning, dan 81.730 RT masuk zona hijau. Seluruh RT tersebut tersebar di 38 kabupaten/kota di Jatim. "Oleh karena itu, maka koordinasi dengan bupati/wali kota penting untuk mem-breakdown lebih detail karena zonasi itu dinamik," imbuhnya.

Terkait PPKM Mikro, Khofifah menjelaskan, setiap kelurahan atau tingkat desa, wajib memiliki posko. "Prinsip basisnya mikro sekali, tingkat RT. Poskonya ada di desa, karena ini kaitan dengan update data, reportase dari seluruh dinamika yang terjadi di desa atau kelurahan itu. Maka masing-masing desa atau kelurahan wajib punya posko," jelasnya.

Mantan Mensos RI menambahkan, penerapan PPKM Mikro tidak jauh beda dengan format kampung tangguh yang sudah diterapkan di Jatim sejak PSBB lalu. "Kita punya best practice kampung tangguh, karena format SOP PPKM Mikro sangat mirip kampung tangguh. Relatif para bupati/wali kota di Jatim sudah punya referensi akan hal itu," tambahnya.

Anggaran PPKM Mikro

Terkait anggaran PPKM Mikro di tingkat RT, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, di kabupaten, anggaran PPKM

Mikro berasal dari dana desa. Menurutnya, ini tercantum di dalam Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021.

"Jadi pada dasarnya sumber dana PPKM Mikro, kalau itu PPKM Mikro di desa, dari dana desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Ini tercantum di dalam Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021," ujar Khofifah di Gedung Negara Graha, Surabaya, Senin (08/02) malam.

Untuk di Kota, Khofifah menyebut, dana PPKM Mikro berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kalau PPKM Mikro di kelurahan, maka dari anggaran pendapatan dan belanja daerah," imbuhnya.

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, operasional Bintara Pembina Desa (Babinsa), berasal dari anggaran TNI dengan dukungan Kemenkeu RI. Lalu untuk operasional Bhabinkamtibmas dari anggaran Polri dengan dukungan Kemenkeu RI. "Tadi malam rapat terbatas khusus membahas ini, Kemenkeu, Wamenkeu, Panglima TNI, Kapolri turut hadir, membangun komitmen di antara pimpinan di institusi masing-masing," jelasnya.

Untuk anggaran 3T (Tracing, Treatment, Testing) berasal dari anggaran Kemenkes RI, BNPB, APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Khofifah juga berharap, PPKM Mikro bisa menekan kasus penyebaran, kasus kematian, serta meningkatkan angka kesembuhan dalam kasus Covid-19. (ist)

ZONA KUNING-HIJAU, KOTA BATU TAK TERAPKAN PPKM MIKRO RT/RW

BATU-Pemerintah Kota (Pemkot) Batu, tak memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menjelaskan jika dalam lingkup RT/RW di wilayahnya tidak ada yang berada dalam zona merah, tapi ada di zona kuning dan hijau. Sehingga, pihaknya akan melakukan PPKM lingkup kota.

Hal tersebut menjadi dasar Pemkot Batu untuk tidak memberlakukan PPKM secara mikro pada tingkat RT/RW. "Dari lima Desa/Kelurahan yang masuk zona merah, kita tidak memberlakukan PPKM Mikro RT/RW, karena setelah dilacak, penyebaran kasus tidak berada dalam satu RT/RW," katanya Selasa, (09/02).

Pasalnya, pemantauan di lapangan, tidak temukan kasus yang terpapar Covid-19 mencapai 10 kasus. "Apabila ditemukan lebih dari 10 kasus dapat dimungkinkan untuk memberlakukan PPKM Mikro," ucapnya.

Lanjutnya, berbicara soal zona merah, jika wilayah diperluas hingga tingkat desa/kelurahan, ada beberapa wilayah yang terpapar lebih dari 10 kasus. Diantaranya

Kelurahan Ngaglik 14 kasus, Kelurahan Songgokerto 13 kasus dan Desa Pesanggrahan 12 kasus. Ada juga Kelurahan Kelurahan Temas dan Junrejo. "Nah jika kita tarik ke tingkat RT/RW tidak ada yg melebihi dari 10 kasus," ungkapnya.

Meski tak menerapkan PPKM Mikro, Pemkot Batu akan tetap mengefektifkan melalui Kampung Tangguh. Oleh karenanya mantan Ketua PKK Kota Batu tersebut mengimbau bagi seluruh masyarakat tetap waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan.

"Kota Batu akan melakukan PPKM lingkup Kota seperti pemberlakuan sebelumnya dengan sedikit perubahan. Kita akan melakukan PPKM lingkup kota seperti kemarin, hanya saja jam operasional diperpanjang 1 jam, yang kemarin sampai jam 8, menjadi jam 9. Untuk Kuota WFH juga ditambah menjadi 50%" katanya.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Batu, saat ini lima Desa/Kelurahan di Kota Batu yang memiliki kasus positif lebih dari 10 dan masuk dalam zona merah diantaranya, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan



Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko.

Foto: Humas Pemkot Batu

Temas, Junrejo, Kelurahan Songgokerto dan Pesanggrahan.

Seperti diketahui, pemerintah pusat kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 22 Februari 2021. Peraturan itu tertuang dalam Surat Instruksi Kemendagri Nomor 3 Tahun 2021. (Sur)

SEGERA CEK! MASA HABIS SIM TAK LAGI SESUAI TANGGAL LAHIR

Jakarta - Masa berlaku surat izin mengemudi (SIM) ada perubahan. Bila sebelumnya masa berlaku SIM mengikuti tanggal lahir pemilik SIM, kini menyesuaikan dengan tanggal permohonan atau pembuatan SIM.

"Iya betul (tidak lagi berlaku hingga tanggal kelahiran)," Kata Kasi SIM Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Lalu Hedwin, Selasa (09/02).

Perubahan aturan itu tertuang dalam surat telegram Korlantas nomor ST/2664/X/Yan.1.1./2019 dan sudah berlaku sejak September 2019. Artinya, warga SIM yang membuat SIM tanggal 9 Februari 2021 maka masa berlaku SIM-nya adalah sampai 8 Februari 2024.

Korlantas Mabes Polri mengubah aturan durasi berlaku SIM agar masyarakat bisa lebih merasakan penggunaan SIM utuh selama 5 tahun. Sementara itu pada aturan lama tertulis bahwa masa berlaku SIM sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran.

"Tetap akan dihitung buatnya kapan, nanti masyarakat yang bisa mengatur supaya bisa pas 5 tahun. Ini sudah berlaku kalau tidak salah saat SIM Smart yang baru berlaku, tahun 2019 kalau tidak salah," sebut Hedwin. Namun, baik aturan baru maupun lama tetap memberlakukan kalau SIM berlaku selama 5 tahun. Hal ini termuat dalam Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2012.

Belum Gratis

Sementara itu, kebijakan lanjutan mengenai aturan dan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) gratis, yang digagas pemerintah masih harus dinantikan. Insentif

tersebut rencananya bakal diberikan khusus masyarakat dengan golongan tertentu, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian RI.

Dalam beleid ini, terdapat 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Polri antara lain soal penerbitan SIM. Baik untuk pembuatan SIM baru, perpanjangan SIM, ataupun pengujian penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi.

"Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0 persen (nol persen)," tulis pasal 7 ayat (1) PP itu. Tapi, kebijakan tersebut saat ini masih dalam pembahasan dan harus mendapatkan restu lebih dahulu dari Menteri Keuangan.

Hal itu dibenarkan Kasi SIM Polda Metro Jaya Kompol Agung Permana. "Jadi implementasi SIM gratis harus diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap), sementara belum keluar," katanya belum lama ini. "Itu pun nanti soal besaran, persyaratan, dan tata caranya harus mendapat persetujuan Menkeu," lanjut Agung.

Hal serupa juga belum dipastikan terkait pemberlakuan ujian SIM online. Namun rencana tersebut sejalan dengan kesiapan implementasi Korlantas Polri terkait 100 hari kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diangkat 27 Januari 2021 lalu.

PERPANJANGAN SIM MASIH AKAN DIKENAKAN BIAYA

(Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi)

- SIM A, dengan biaya sebesar Rp 80.000
- SIM B1, dengan biaya sebesar Rp 80.000
- SIM B2, dengan biaya sebesar Rp 80.000
- SIM C, dengan biaya sebesar Rp 75.000
- SIM C1, dengan biaya sebesar Rp 75.000
- SIM C2, dengan biaya sebesar Rp 75.000
- SIM D, dengan biaya sebesar Rp 30.000
- SIM D khusus D1, dengan biaya sebesar Rp 30.000
- SIM Internasional, dengan biaya sebesar Rp 225.000

PERSYARATAN: SIM LAMA, KTP ASLI DAN FOTOKOPI, TES KESEHATAN, DAN TES PSIKOLOGI (BERBEDA DI BEBERAPA DAERAH).



Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Istiono menyebutkan bahwa ujian online akan diberlakukan untuk tes teori. "tetapi untuk ujian praktek harus tetap hadir," ungkap Istiono dalam keterangan resmi belum lama ini.

Istiono menyebutkan pihaknya siap melaksanakan kebijakan Kapolri terkait penindakan hukum dalam berlalu lintas secara elektronik ataupun digital. Termasuk dalam pengembangan pelayanan SIM dan Samsat dibidang IT. (ist)

KABUPATEN BLITAR GELAR SWAB ANTIGEN DI PERBATASAN

penerapan PPKM Mikro, maka perlu dilakukan mapping sejauh mana penyebaran Covid-19 di berbagai titik termasuk jalur darat antar daerah ini," ujar Kapolres Blitar, AKBP Leonard M Sinambela, Selasa (09/02).

Untuk diketahui, personel gabungan dari Polkes Polres Blitar, Sat Pol PP dan Dishub Kabupaten Blitar, menggelar pembagian masker dan Swab Antigen gratis di jalur utama perbatasan antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung di Jalan Raya Jimbe, Kecamatan Kademangan.

Pembagian masker dan Swab Antigen gratis ini, dilakukan terhadap semua pengguna jalan. Baik roda 2, roda 4 maupun mobil angkutan barang umum seperti truk dan pickup. Terutama yang bernopol luar daerah, mereka dihentikan dan dicek KTP nya. Kemudian discreening, dengan pemeriksaan suhu tubuh. "Mereka langsung di Swab Antigen di Pos Lintas Kademangan,

jika suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat dan tidak memakai masker. Jadi tidak semua tapi acak," terang mantan Kapolres Blitar Kota ini.

Adapun hasil dari Swab Antigen gratis di jalur perbatasan ini, terjaring 37 orang yang dites dan ada 1 orang yang positif. "Karena positif, langsung dibawa oleh Tim Covid Hunter Polres Blitar ke rumah sakit rujukan di RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar," imbuhnya.

Dijelaskan AKBP Leonard selain mendeteksi dan mapping 3T (Tracing, Testing dan Treatment), langkah ini sekaligus mengedukasi warga terhadap pencegahan penyebaran Covid-19 secara mikro pada titik-titik rawan. "Mulai tingkat kecamatan, desa sampai RT. Dengan melakukan pembagian masker dan Swab Antigen gratis bersamaan dengan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN), bisa menjadi sinergitas untuk bangkit dari pandemi Covid-19," jelasnya. (Ais)



Kapolres Blitar, AKBP Leonard M Sinambela dan Ketua PWI Blitar Raya Irfan Anshori memantau Swab Antigen gratis di jalur perbatasan Kab Blitar-Kab Tulungagung.

BLITAR (Lenteratoday) - Hari pertama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Kabupaten Blitar menggelar Swab Antigen dan pembagian masker gratis di jalur perbatasan. Langkah ini dilakukan agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan semaksimal mungkin.

"Sesuai dengan kebijakan pemerintah

IMPRESSION

Sade Suganto

**MELUNCURKAN CINTA
LEWAT LAGU U GOT ME**

U Got Me

Solois wanita, Sade Susanto meluncurkan lagu baru berjudul "U Got Me" sebagai perayaan cinta.

Inspirasi lagu "U Got Me" berasal dari ungkapan perasaan Sade ketika terpikat oleh seseorang yang dia sukai. Dia menyadari bahwa dirinya sedang jatuh cinta tetapi tidak bisa mendeskripsikan dan mencari alasannya kenapa.

"Aku harap dengan lagu ini (U Got Me) bisa memberitahu orang-orang bahwa cinta itu wajar untuk dirayakan, enggak perlu takut dan malu untuk suka sama seseorang. Love is a blessing, baik untuk seseorang, keluarga, atau bahkan diri sendiri," kata Sade Susanto dalam keterangan resminya (Jumat, 5/2/2021).

Lagu dengan lirik yang straightforward dan cukup berani ini ditulis oleh Sade Susanto sendiri dan temannya Lutfi Adianto atau biasa dikenal dengan 'Cosmicburp'.

Mereka juga bekerja sama dengan produser bernama Heston Prasetyo yang juga salah satu anggota dari band bernama Vintonic.

Sade juga tampil berbeda dibandingkan lagu sebelumnya yang bertitik berat pada aransemen instrumen drum elektronik dan synthesizer.

Di lagu ini Sade, Lutfi dan Heston berusaha menyampaikan pesan yang lantang dengan fokus aransemen pada instrumen ritmik gitar distorsi, bass elektrik, dan drum akustik yang secara langsung direkam di studio.

Lagu "U Got Me" dari Sade Susanto sudah dapat didengarkan melalui berbagai layanan musik digital.

Bulan September 2020, Sade Susanto juga merilis lagu baru berjudul "Don't Control Me" yang terinspirasi dari pengalaman pribadinya.

Lagu "Don't Control Me" berisi pesan positif yang mengajak pendengarnya untuk lepas dari perasaan dikekang oleh orang lain.

"Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang untuk sadar bahwa hidup kita ya punya kita sendiri," kata Sade Susanto.

Sade memberikan gambaran ketika kita dikekang oleh seseorang berdampak pada diri sendiri yang berjalan stagnan sehingga tidak mengalami perkembangan dalam kehidupan.

Hal tersebut membuat individu tidak memiliki nilai lebih dan seutuhnya, baik dalam kehidupan percintaan, masalah pribadi atau konstruksi sosial masyarakat.

"Don't Control Me" memiliki lirik yang lugas dan nempel di telinga. Penyanyi berusia 20 tahun itu juga ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang yang sedang terjebak dan berusaha keluar dari situasi, entah itu toxic relationship, keluar dari zona nyaman atau stereotip buruk yang biasa melekat.

Untuk urusan aransemen musik, lagu ini cukup easy listening dan memberikan nuansa R&B yang kuat dan sangat kental. "Don't Control Me" juga menjadi rilisan pertama Sade Susanto di bawah naungan label Juni Records (Ant).

MENGATUR KEBIASAAN BAIK,

Tingkatkan Imunitas Tubuh

Imunitas didapatkan melalui proses jangka panjang sebagai hasil dari serangkaian kebiasaan baik yang dilakukan, bukan semata instan berkat konsumsi suplemen. Profesor Nicole Avena, PhD dari Universitas Princeton mengandaikan imunitas adalah lari maraton bukan sprint, oleh karenanya tak ada cara cepat dan mudah untuk menaikkan imunitas tubuh. "Anda harus melakukan secara menyeluruh jika ingin membuat imunitas dalam bentuk yang siap perang," kata Avena dikutip dari Women's Health.



1. TIDUR CUKUP

Cukupi kebutuhan tidur setidaknya tujuh jam setiap malam. Orang-orang yang tidur selama enam jam semalam atau kurang selama satu minggu memiliki kemungkinan empat kali lebih tinggi terserang flu ketika terkena virus dibandingkan dengan mereka yang mendapat lebih dari tujuh jam. Risiko jatuh sakit bahkan lebih tinggi bagi mereka yang tidur kurang dari lima jam semalam.



2. STRES

Stres memicu produksi kortisol. Saat hormon kortisol tinggi maka sistem imunitas tak akan aktif, kata profesor imunologi di Universitas Manchester, Inggris, Daniel M. Davis, PhD. "Tubuh Anda mengerahkan semua sumber dayanya ke benda yang dianggapnya paling mungkin membunuh Anda, dan jauh dari hal-hal lain, seperti jaringan pelindung Anda."



3. OLAHRAGA PINTAR

Berolahraga menciptakan peradang yang baik dalam tubuh, kata Wherry. Penelitian menemukan bahwa orang yang berolahraga secara teratur dapat membantu memodulasi hormon stres kortisol, yang ketika dinaikkan itu akan menyebabkan aktivitas peradangan. Namun beberapa ahli setuju olahraga berlebihan dapat menghambat kekebalan.



4. MAKANAN KAYA MAGNESIUM

Makanan kaya akan magnesium seperti bayam, kacang-kacangan membantu tubuh dan otak untuk rileks sehingga bisa membantu tidur lebih nyenyak.



5. SUHU UDARA KAMAR 18 DERAJAT CELSIUS

Suhu ruangan 18 derajat Celcius dianggap paling cocok untuk membuat kantuk dan tidur yang pulas sepanjang malam. (Ant)



Para penyedia jasa teknologi tanda tangan digital diminta oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memastikan aspek keamanan bagi penggunaannya.

Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan penyelenggara platform tanda tangan digital harus dapat memastikan keamanan karena menyangkut kepercayaan.

"Kita mendukung hadirnya aplikasi 'Téken Aja!' yang diharapkan mencegah tindak pemalsuan tandatangan yang kerap terjadi," kata Semuel (Sabtu, 6/2/2021).

Semuel menjelaskan dalam ruang digital, aspek verifikasi harus ditegakkan, tak terkecuali dalam teknologi tanda tangan digital.

Hal ini menjadi tugas PT Djelas Tanda-tangan Bersama (DTB) selaku penyedia

platform Téken Aja! untuk memastikan keamanan jasanya.

Semuel mengatakan Téken Aja! yang merupakan platform tanda tangan digital diharapkan bisa menjadi katalis dalam mendigitalkan Indonesia, serta mencegah tindak pemalsuan tanda tangan yang kerap terjadi.

Dengan begitu, Téken Aja! juga akan membantu membangun ekosistem digital yang sehat dan aman, ujarnya.

Platform Téken Aja! yang dalam waktu dekat diperkenalkan kepada publik dan berinduk ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Keunggulan dari aplikasi ini, selain ramah lingkungan karena menggantikan penggunaan kertas, hemat ruang dan mudah untuk digunakan, serta memiliki teknologi dan pengamanan tingkat tinggi yang dinamakan



Foto: Humas PT DTB

kan infrastruktur kunci publik (IKP).

"Untuk mendapat pengakuan penyelenggara sertifikat elektronik (PSrE) di Kementerian Kominfo tidak mudah karena sebelumnya harus melalui audit keamanan digital yang panjang dan melelahkan," kata CEO PT Djelas Tanda-tangan Bersama (DTB), Alwin Jabarti Kiemas (Ant).

MUST-HAVE! BELT YANG BIKIN RAMPING DAN FASHIONABLE



Mau terlihat lebih ramping dan fashionable secara bersamaan? pakai saja ikat pinggang atau belt. Tidak hanya bikin penampilan kamu rapi, belt bisa membuat ilusi tubuh lebih ramping, lho! Ikat pinggang atau belt itu adalah item fashion yang wajib kamu punya. Bukan hanya untuk merapikan pakaian atau hanya membuat celana lebih nyaman digunakan, tapi juga berfungsi sebagai aksesoris dan membuat cantik penampilan kamu. Bahkan beberapa ikat pinggang juga bisa membuat kamu terlihat lebih ramping.

BUCKLE BELT

Ikat pinggang yang satu ini bisa kamu gunakan untuk gaya kasual maupun formal. Untuk gaya formal, kamu bisa pilih buckle belt warna hitam atau coklat dengan bahan kulit sintetis atau leather. Kamu juga bisa menggunakan buckle belt pada loose dress favorit kamu agar lebih fashionable dan ramping.

OBI BELT

Jika kamu menginginkan tampilan yang lebih ramping, ikat pinggang jenis ini cocok sekali kamu jadikan andalan, Ladies. Kamu bisa menggunakan obi belt untuk dress atau kemeja favorit kamu. Tidak hanya membuat kamu terlihat fashionable tapi juga membentuk ilusi tubuh ideal.

CHAIN BELT

Chain belt bukan sekadar digunakan untuk hiasan saja, Ladies. Jika kamu menggunakan ikat pinggang jenis ini orang-orang akan berfokus pada ada ikat pinggang yang kamu gunakan sehingga tidak terlalu memperhatikan bagian tubuh kamu.

DOUBLE PRONG BELT

Ikat pinggang yang satu ini cocok sekali untuk kamu yang suka bergaya keren atau swag. Kamu bisa memadukannya dengan ripped jeans atau bahkan street styler sering menggunakan double prong belt dengan outfit yang lebih girly, sehingga penampilan kamu akan terlihat unik dan nyentrik.

CORSET BELT

Ikat pinggang yang satu ini ampuh sekali membuat ilusi tubuh menjadi lebih ramping dan seksi seperti fungsi korset pada umumnya. Namun bedanya corset belt bisa kamu gunakan setelah outfit, kamu bisa menggunakan warna outfit dan ikat pinggang yang senada jika tidak ingin terlalu mencolok, Ladies.



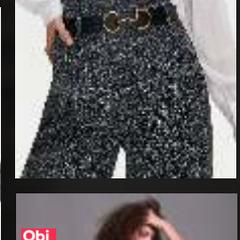
Chain Belt



Buckle Belt



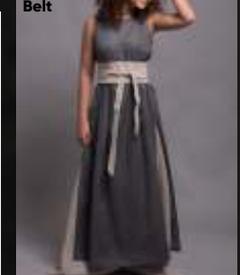
Corset Belt



Obi Belt



Double Prong Belt



Nah, itu dia 5 ikat pinggang yang wajib kamu miliki untuk kesan fashionable dan juga membuat tubuh kamu terlihat lebih ramping dan menarik. Siap-sipa belanja yuk! (Ist)

Tarik Ulur *(dari hal 1)*

Di tengah pandemi Covid-19, suhu politik di tanah air menghangat dipicu oleh rencana revisi Undang-undang Pemilu. Mayoritas fraksi di Senayan saat ini ingin agar pembahasan RUU Pemilu tak dilanjutkan. Situasi ini terjadi setelah NasDem dan PKB 'balik badan'.

Setelah sempat menyatakan mendorong agar pembahasan RUU Pemilu dilakukan, PKB dan NasDem kini bergabung bersama PDIP, PAN, serta PPP menyatakan menolak atau tak mau melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

Sikap Golkar sendiri masih 'terbelah'. Politisi Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin kelihatan berbeda pandangan dengan partainya terkait revisi UU Pemilu. Pasalnya, Azis menilai revisi UU Pemilu sangat penting dan relevan sebagai upaya untuk memperkuat kualitas demokrasi bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Padahal, sebelumnya secara resmi Partai berlambang pohon beringin itu memutuskan untuk tidak melanjutkan dukungan revisi UU Pemilu.

Dengan begitu, saat ini hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terang-terangan mendukung rencana revisi dua aturan pemilu. Diketahui, Revisi UU Pemilu sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021. RUU Pemilu menggabungkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Draf RUU Pemilu saat ini masih dalam tahap peninjauan alias belum final. Draf terakhir yang disusun Komisi II DPR diketahui mengatur tentang rencana pilkada serentak selanjutnya, yakni pada 2022 dan 2023.

Hal ini tidak seperti ketentuan di regulasi sebelumnya, di mana pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden.

Merujuk Pasal 731 Ayat (2) dalam draf revisi UU Pemilu, Pilkada 2022 akan diikuti oleh 101 daerah yang menggelar Pilkada pada 2017. Artinya beberapa kepala daerah yang menjadi perhatian publik akan termasuk di antaranya.

Para pengamat pun mulai meramalkan nasib Anies, Ridwan Kamil (RK), Edy hingga Khofifah. Baik Anies, RK, Edy dan

Khofifah saat ini merupakan kepala daerah. Anies merupakan Gubernur DKI Jakarta yang masa jabatan periode pertama habis 2022. Sementara Emil Gubernur Jabar bersama Edy Rahmayadi Gubernur Sumatera Utara, dan Khofifah Gubernur Jawa Timur yang habis 2023.

Mereka semua baru satu kali menjabat sebagai kepala daerah. Artinya, mereka masih mempunyai peluang untuk kembali mencalonkan diri di periode kedua jika pelaksanaan Pilkada dinormalisasi sebagaimana diatur dalam Revisi UU Pemilu.

Secara rinci, Anies mulai menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 2017 lalu. Masa baktinya akan habis pada tahun depan yakni 2022. Sementara RK, Edy dan Khofifah menjabat sebagai gubernur sejak 2018. Masa bakti mereka akan habis di 2023.

Dalam Pilkada DKI 2017, Anies kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno yang kini menjabat Menparekraf. Mereka diusung oleh Gerindra dan PKS.

Sementara RK dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum dan diusung oleh NasDem, PPP, Hanura dan PKB. Lalu Edy Rahmayadi di Pilkada 2018 berpasangan dengan Musa Rajekshah diusung oleh Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN dan NasDem. Terakhir, Khofifah di Pilkada 2018 berpasangan dengan Emil Dardak. Mereka diusung Demokrat, Golkar, PPP, NasDem, PAN dan Hanura.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai jika Pilkada tidak digelar di 2022, maka Anies akan kehilangan panggung politik untuk maju di Pilpres 2024. Begitu juga kepala daerah lain yang punya kans maju lagi di Pilkada 2022 dan 2023. Salah satunya Ridwan Kamil yang turut masuk di bursa capres 2024. "Kalau tidak ada pilkada di 2022 dan 2023 Anies, Ridwan Kamil akan kehilangan panggung politik," kata Adi.

Dengan begitu, maka Anies harus 'manggung' sekitar 2 tahun untuk masuk bursa capres 2024. Sementara Ridwan Kamil, Edy Rahmayadi dan Khofifah menunggu selama satu tahun. "Berat bagi mereka menjaga stamina politik mereka setelah enggak jadi gubernur. Karena politik kita dinamis, dalam 6 bulan 7 bulan sudah ganti pemain," tutur Adi.

Sementara Peneliti Centre for Strategic International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan tarik menarik antar fraksi terkait jadwal pelaksanaan Pilkada sebaiknya jangan digunakan sebagai upaya

menjegal calon potensial di Pemilu 2024.

"Menurut saya, alasan normalisasi itu hendaknya bukan karena alasan ada keuntungan politik tertentu bagi satu partai atau satu kandidat atau untuk menjegal kandidat tertentu," kata Arya.

Arya berpandangan seluruh partai memiliki potensi keuntungan yang sama apabila jadwal pilkada dinormalisasikan menjadi tahun 2022 dan 2023. Sehingga ia berharap tak ada upaya saling menjegal. "Saya kira semua partai punya potensi keuntungan yang sama kalau itu dinormalisasi. Antar partai antar calon saya kira itu (jangan saling jegal)," tutur Arya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan ada banyak hal yang harus diperhatikan pemerintah jika pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar serentak pada 2024. Jadwal pilkada ini memiliki konsekuensi akan ada pelaksana tugas, penjabat sementara, atau penjabat kepala daerah yang habis masa tugas pada 2022 dan 2023.

Khofifah mencontohkan pengalaman adanya plt, penjabat sementara, dan penjabat kepala daerah di Jawa Timur menjelang Pilkada 2020 lalu. "Di lapangan sempat ada sembilan pjs, satu penjabat, dan dua plt di Jatim saat pilkada serentak kemarin. Saya melihat memang power-nya beda," kata Khofifah dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia "Aspirasi Publik terhadap UU Pemilu dan Pilkada", Senin (08/02).

Khofifah mengatakan power dari seorang kepala daerah menjadi penting terutama pada saat-saat mereka harus mengkomunikasikan dengan DPRD ketika harus merumuskan prioritas program dan membahas anggaran. Ia juga menyinggung efektivitas pemerintahan daerah jika terjadi rotasi ASN pada jabatan tertentu.

Sementara Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku tidak mau ambil pusing mengenai penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 berlangsung sesuai jadwal atau diundur secara serentak pada 2024.

Ia lebih memilih mengikuti keputusan politik yang terjadi di antara pihak level pemerintah pusat. Menurut dia, Undang-Undang Pilkada yang selalu berubah adalah hal yang biasa. Perubahan aturan ia rasakan saat maju di Pemilihan Wali Kota Bandung tahun 2013 silam hingga Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

"Pilkada itu kalau saya ikut saja keputusan politik karena saya tahu tiap lima tahun UU pemilu itu direvisi terus, waktu Wali Kota saya itu dosen ITB yang boleh cuti nah, pas Pilgub harus keluar dan tidak boleh jadi PNS maka saya keluar, jadi berubah-ubah aja," ucap dia di Mapolda Jabar, Selasa (02/02).

"Bagi saya yang pengabdian, terserah mau 2023 saya ada Pilgub lagi atau ditunda saya tidak masalah. Kalau urusan kepemimpinan seperti ini takdir tuhan, kalau memang tidak ada garis tangannya ya pasti gak akan jadi, jadi saya percaya itu," ia melanjutkan. (ist,ins)

<p>Landasan Pilpres April 2024 Pasal 167 ayat 3, 6 dan 7 UU Pemilu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. (6) Tahapan Penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara. (7) Penetapan Pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan Wakil Presiden. 	<p>Landasan Pilkada November 2024 Pasal 201 ayat 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. <p>Dampak Pilkada 2024: Penjabat (PJ) UU Pilkada Pasal 201 Ayat 9</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk mengisi kekosongan 	<p>jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali kota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.</p>
---	--	---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
Mengucapkan

SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2021



"Bangkit Dari Pandemi, Pers Sebagai Akselerator
Perubahan dan Pemulihan Ekonomi"



Muhammad Ilmi Zada, ST
Wakil Ketua DPRD

Sugiantoro, A.Md
Wakil Ketua DPRD

H.M. Miyadi, S.Ag, MM
Ketua DPRD

Andi Hartanto, S.Pd
Wakil Ketua DPRD

Sri Hidajati, S.Sos, M.Ikom
Plt. Sekretaris DPRD

Instagram Facebook DPRD Kabupaten Tuban

Website www.dprd-tuban.go.id

PEMERINTAH
KOTA MALANG



MENGUCAPKAN

SELAMAT & SUKSES



Drs. H. SUTIAJI
Walikota Malang

Ir.H. SOFYAH EDI JARWOKO
Wakil Walikota Malang



JAGA DIRI, JAGA KELUARGA,
& JAGA NEGARA
SUKSESKAN GERAKAN
VAKSINASI COVID 19

#MEDIABERSAMALAWANGCOVID19#
SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2021

Membangun masyarakat yang
beradab, membangun informasi yang edukatif dan
mencerahkan serta perangi hoax dan berita yang

BAGIAN HUMAS SETDA KOTA MALANG

JAGA PROTOKOL KESEHATAN

PATUHI 6 M



Memakai
Masker



Mencuci
Tangan
dengan
sabun dan
air mengalir



Menjaga
jarak



Menjauhi
kerumunan



Membatasi
Mobilitas
dan
interaksi



Menjaga
Imun tubuh